



RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS: KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA

Anwar Ilmar

Program Studi Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
anwar.ilmar@gmail.com

Abstract: This article is motivated by the emergence of the phenomenon of radicalism and new social movements after the collapse of the Soviet Union. Previously, the discourse of social movements was dominated by the perspective of Marxism. The discourse of a class of economic determinism is often a reference to explain the various phenomena of social movements demanding equality, redistribution and justice. Later, these demands are not only played by class discourse and economic issues, but also other issues such as culture, environment, gender, ethnicity, etc. are also present as major issues in the social movement.

This article aims to explain the phenomenon of radicalism of ethnic-based movements by taking the case of the Free Papua Movement. This article concludes that the Free Papua Movement movement is a manifestation of a new social movement that carries ethnic identity as the locus of its movement. The Free Papua Movement is also a radical movement that has stated goals for establishing an independent Papuan state and conducting arms struggle to realize its demands. So the character of the new social movements and alternative struggles formulated by Laclau and Louffe through the democratic struggle is irrelevant to the case of the Free Papua Movement. Therefore, this article formulates the existence of a new social movement that experienced the radicalism of the movement as happened in the Free Papua Movement.

Keyword: New Social Movement, Radicalism, Free Papua Movement, Political Identity

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena radikalisme dan gerakan sosial baru pasca runtuhnya Uni Sovyet. Sebelumnya, wacana gerakan sosial sangat didominasi oleh perspektif marxisme. Wacana kelas yang bersifat determinisme ekonomi sering kali menjadi rujukan untuk menjelaskan berbagai fenomena gerakan sosial yang menuntut persamaan, redistribusi, dan keadilan. Belakangan, tuntutan tersebut tidak hanya dimainkan oleh wacana kelas dan isu-isu ekonomi saja, melainkan juga isu-isu lainnya seperti kebudayaan, lingkungan, gender, etnis, dan lain sebagainya juga hadir sebagai isu-isu utama dalam gerakan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena radikalisme gerakan berbasis etnis dengan mengambil kasus Organisasi Papua Merdeka. Artikel ini menyimpulkan bahwa gerakan Organisasi Papua Merdeka merupakan wujud dari gerakan sosial baru yang mengusung identitas etnis sebagai lokus gerakannya. Organisasi Papua Merdeka juga merupakan gerakan radikal yang memiliki *stated goals* untuk mendirikan negara Papua merdeka dan melakukan perjuangan senjata untuk mewujudkan tuntutannya. Sehingga karakter gerakan sosial baru dan alternatif perjuangan yang dirumuskan oleh Laclau dan Mouffe melalui perjuangan demokratis tidak relevan untuk kasus Organisasi Papua Merdeka. Oleh karenanya, artikel ini merumuskan adanya gerakan sosial baru yang mengalami radikalisme gerakan sebagaimana yang terjadi pada Organisasi Papua Merdeka.

Kata Kunci: *Gerakan Sosial Baru, Radikalisme, Organisasi Papua Merdeka, Politik Identitas*

PENDAHULUAN

Radikalisme sering dipahami sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan (transformasi) secara mengakar atau ekstrim. Pemahaman ini dapat dilacak dari konseptualisasi tentang konflik dan perubahan sosial yang terdapat dalam perspektif marxisme, karena pada dasarnya secara genealogis wacana tentang radikalisme lahir dari tradisi pemikiran marxisme.

Dalam perspektif marxisme, perubahan terjadi sebagai akibat kontradiksi kelas yang terbentuk dan dimana masing-masingnya bertentangan satu sama lain secara diametral dalam konflik abadi. Dalam perspektif ini, konflik akan terus terjadi selama masyarakat komunis belum terbentuk. Maka kontradiksi tersebut akan mendorong revolusi sebagai akibat yang tak terelakkan. Revolusi akan menyalakan struktur kelas tersebut beserta negara yang dipandang sebagai alat perpanjangan tangan kelas dan kemudian pada akhirnya menciptakan tatanan masyarakat tanpa kelas.¹

Perspektif marxisme juga menilai konflik yang terjadi pada struktur kelas di dalam masyarakat tersebut bersifat permanen. Konflik permanen tersebut muncul akibat berlangsungnya fenomena seperti ketimpangan, ketidakadilan, dan opresi dalam hubungan-hubungan produksi yang dilakukan kelas borjuis (pemilik modal) terhadap kelas proletar (pekerja), sehingga memunculkan gerakan sosial yang dimotori oleh kelas tertindas yakni kelas proletar untuk melakukan perubahan radikal menghapuskan struktur kelas dengan jalan revolusi.²

Pemikiran marxisme ini kemudian menjadi dasar dari lahirnya gerakan-gerakan sosial buruh bahkan partai politik yang berideologikan sosialisme/komunisme di seluruh dunia. Dan bahkan sempat berjaya dibawah panji Uni Sovyet meski akhirnya runtuh baik akibat faktor internal yang disebabkan birokratisme, korupsi, dan sentralisme kekuasaan yang ketat dan otoriter, maupun faktor eksternal akibat kalah berkontestasi dengan liberalisme-kapitalisme.

¹ Robert Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 89-100.

² Ron E. Robert dan Robert Marsh Kloss, *Social Movements: Between the Balcony and Barricade*. St.Louis, Missouri: The CV. Mosby Company, 1979, hlm.14.

Namun, pada perkembangan selanjutnya, pendekatan marxisme ini banyak dikritik. Bahwa akibat penekanannya yang terlampau berlebihan pada determinisme ekonomi, membuat isu-isu penting lainnya dalam proses perubahan sosial seperti ras, ekologi, jenis kelamin, atau kelompok okupasi nonekonomi, menjadi tersimplikasi menjadi sekadar konflik kelas dalam isu ekonomi antara borjuis dan proletar.

Pendekatan marxisme yang menekankan pemikiran yang deterministik tersebut semakin keras mendapat kritikan dan bahkan dipandang tidak relevan lagi yaitu tatkala ideologi sosialisme/komunisme yang menjadi ideologi gerakannya hancur ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Sovyet. Gerakan-gerakan sosial tidak lagi berbasis kelas sebagaimana menjadi wacana utama dalam perspektif marxisme, akan tetapi melihat munculnya berbagai kelompok yang mengatasnamakan identitas kebudayaan tertentu sebagai kontestan dalam debat-debat di wilayah publik dalam sistem demokrasi kapitalis; mereka sepenuh hati memperjuangkan isu redistribusi, pengakuan dan representasi. Dalam konteks ini, politik identitas telah menarik negara ke dalam perang budaya.³

Kebudayaan menjadi sebuah konsep yang lebih relevan untuk menjelaskan fenomena baru dalam perpolitikan dan menjadi konsep penting dalam perkembangan teori-teori sosial dan politik kontemporer jika menggunakan kerangka analisis diskursus. Diskursus kebudayaan menjadi bermakna politik ketika dikaitkan dengan, misalnya isu hegemoni, antagonisme, atau dominasi.⁴ Isu tersebut dewasa ini semakin menguat seiring dengan tuntutan perubahan dan perjuangan yang diangkat oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas budaya tertentu baik di level regional dan internasional ataupun di wilayah lokal. Laclau dan Mouffe merangkum berbagai gerakan atau perjuangan yang tidak berbasis kelas dan bukan gerakan proletar (pekerja), seperti gerakan kaum urban, gerakan lingkungan, gerakan anti-otoriterisme, gerakan anti-institusi,

³ Nuri Suseno, *Kewarganegaraan : Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: Dept. Ilmu Politik FISIP UI, 2010, hlm. 66.

⁴ *Ibid.*, hlm. 67.

gerakan feminis, gerakan anti-rasisme, gerakan berbasis etnis, dan lain sebagainya sebagai fenomena gerakan sosial baru.⁵

Di Indonesia bahkan terdapat beberapa gerakan yang berbasiskan identitas tertentu. Salah satunya adalah gerakan berbasis etnis yang dimotori oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bertujuan menjadikan Papua sebagai negara merdeka, lepas sebagai bagian dari provinsi Indonesia. Dasar tujuan dari gerakan tersebut menurut banyak kalangan disebabkan karena telah terjadi ketidakadilan dan opresi yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua terutama berkaitan dengan alokasi sumber daya yang tidak seimbang antara Papua dan pemerintah pusat. Namun demikian, isu kesenjangan ekonomi ini tidaklah cukup untuk menggerakkan politik identitas di Papua. Isu-isu seperti perbedaan etnis dengan kebanyakan orang Indonesia lainnya juga mendorong lahirnya gerakan tersebut. Fenomena ini yang menarik untuk dikaji dalam konteks radikalisme, politik identitas, dan gerakan sosial baru.

Radikalisme

Radikalisme baik secara teoritis maupun praktis sering dirujuk pada wacana dan gerakan yang mengusung tradisi pemikiran politik Karl Marx atau sering disebut marxisme. Menurut perspektif ini, sejarah masyarakat ditandai oleh pertentangan kelas. Marx dengan konsep materialisme historisnya menjelaskan bahwa sejarah masyarakat secara dialektis tidak lain tersusun berdasarkan cara-cara produksi material. Materialisme historis dan dialektis ini menyatakan bahwa setiap cara produksi di setiap tahapan perkembangan masyarakat menghasilkan struktur-struktur kelas sosial yang saling bertentangan. Masyarakat baru kemudian muncul sebagai buah pertentangan antar struktur kelas pada masyarakat yang lama.⁶

Marx hidup di dalam masyarakat industrial yang tengah berkembang. Dalam masyarakat ini, menurut Marx, terdapat dua kelas utama yaitu kelas yang berkuasa (borjuis, pemilik modal) dan kelas yang teropresi (proletar, pekerja). Kelas proletar sekadar menjual tenaga kepada kelas borjuis. Marx melihat sejarah

⁵Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Post Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, 2008, hlm. 159.

⁶John J. Macionis, *Sociology 15th Edition*. Canada: Pearson Education, 2013, hlm. 87.

perkembangan masyarakat tersusun karena adanya pertentangan kelas. Sehingga Marx pun menyamakan hubungan antara borjuis dan proletar serupa dengan hubungan majikan dan budak di zaman kuno ataupun kaum feodal dan petani penggarap di era agraris. Borjuis memperlakukan proletar tidak lebih sebagai alat produksi. Konflik antara borjuis dan proletar bersumber pada penguasaan alokasi kekuasaan politik dan ekonomi hanya di satu kelas. Konsekuensi dalam hubungan konflik ini adanya benturan untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan tersebut.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial di dalam masyarakat merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari karena sifatnya yang permanen, dan terjadi akibat adanya konflik antar struktur kelas di dalam masyarakat. Maka menurut Marx jalan untuk mengubah keadaan tersebut hanya bisa dilakukan dengan melakukan perubahan secara mengakar (radikal) dengan menumbangkan struktur-struktur masyarakat yang bersifat menindas melalui revolusi yang digerakkan oleh kaum tertindas (proletar). Dari pemahaman diatas, maka konsep radikalisme sering dikaitkan dengan suatu kecenderungan untuk melakukan transformasi yang mengakar dan ekstrim.

Ciri yang menonjol dari radikalisme gerakan antara lain sifatnya yang konfrontatif dengan dasar deklarasi tuntutan, menolak segala bentuk kompromi, menjadi karakter perlawanan garis keras dan mensahkan penggunaan kekerasan dalam aktivitas gerakannya. Contoh nyata dari gerakan ini adalah Revolusi Oktober 1917 yang digerakkan oleh Lenin bersama Partai Bolshevik yang menumbangkan kekaisaran Tsar di Rusia dengan perlawanan bersenjata dan menggantikan sistem feodalisme menjadi komunisme Uni Sovyet.⁸ Sejak kemunculan pemikiran radikalisme dalam perspektif marxisme, segala gerakan yang berbasis pada kelas terutama gerakan proletar (buruh) telah ikut melekat didalamnya watak atau karakter radikalisme dalam perilaku gerakannya.

Namun, pada perkembangannya, pemikiran ini semakin tenggelam dan mendapat kritikan keras dari berbagai kalangan termasuk di dalam penganut

⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

⁸ Frans Magnis Suseno, *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikir Marxis Dari Lenin Sampai Tan Malaka*. Jakarta: PT Gramedia, 2003, hlm. 31.

tradisi pemikiran marxisme sendiri karena teorinya yang kaku dan terlalu memberikan penekanan pada determinisme ekonomi sebagai penyebab kontradiksi kelas. Ada fenomena gerakan lain yang tidak berbasis kelas dengan mengusung politik identitas tertentu tidak dapat disimplifikasikan ke dalam pertentangan kelas.

Politik Identitas

Pemikiran marxisme sangat berpengaruh besar terutama di negara-negara yang merasakan opresi atas negara dan rezim kapitalisme. Pemikiran ini menawarkan perubahan radikal untuk menghilangkan ketimpangan sosial akibat adanya struktur kelas dengan jalan revolusi menuju sosialisme. Namun sejak jatuhnya pemerintahan dan hilangnya kekuasaan partai komunis di Eropa Timur pada era 1990an, menjadi babak penutup dari era pertarungan diantara kedua isme tersebut. Sosialisme dengan dua prinsip utamanya; redistribusi dan persamaan, menghilang dari pertarungan di dunia intelektual dan praktis.⁹

Saat ini banyak ilmuwan politik melihat bahwa peran identitas menjadi semakin relevan dalam perpolitikan saat ini. David Miller sebagaimana dikutip oleh Nuri Suseno menjelaskan betapa pentingnya persoalan identitas dalam memahami perpolitikan yang berkembang dalam dekade terakhir ini. Miller memberikan perhatian yang cukup besar pada peningkatan peranan identitas kelompok dalam perpolitikan. Negara-negara baru yang terbentuk setelah runtuhnya Uni Sovyet, konflik-konflik besar dan berdarah di Balkan, Afrika, Timur Tengah, demikian juga konflik di Indonesia, berkembang dengan identitas kelompok sebagai sebuah isu penting.¹⁰

Selain disebabkan oleh menyurutnya diskursus dari dua narasi besar yakni sosialisme dan kapitalisme, isu identitas umumnya muncul dalam masyarakat multikultur dan plural. Menurut Miller kelompok-kelompok budaya mengajukan tuntutan agar sistem politik yang demokratis membuka diri menerima kehadiran dan memperlakukan secara adil dan setara kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya persamaan etnisitas, agama, gender, atau orientasi seksual yang

⁹ Nuri Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

mengabaikan atau menghancurkan mereka. Kelompok-kelompok yang terbentuk dengan dasar identitas selama ini merasa bahwa mereka telah dieksklusikan dari arena perpolitikan atau institusi-institusi formal dan diabaikan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan baik di tingkat nasional maupun lokal.¹¹

Kecenderungan lain munculnya politik identitas adalah berupa penolakan atau resistensi atas sesuatu yang kurang dikenal atau diterima secara umum karena dapat menimbulkan rasa tidak aman atau tidak nyaman bagi (sebagian atau semua) anggota masyarakat. Kecenderungan ini bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar dan kecenderungan ini muncul ketika seseorang atau kelompok orang menghadapi berbagai upaya “homogenisasi”, devaluasi, marjinalisasi yang dilakukan oleh mereka yang takut terhadap perbedaan.¹²

Maka, tuntutan yang diangkat oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan identitas budaya menjadi semakin terdengar gaungnya. Gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak dari kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau teropresi sebetulnya telah lama ada, tetapi perjuangan mereka tidak cukup mendapat tempat serta perhatian luas di masa lalu. Gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak-hak sosial, politik, dan sipil ini yang dikenal dengan istilah gerakan sosial baru, menjadi terdengar keras suaranya bersamaan dengan melemahnya sosialisme. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak, sangat bervariasi tuntutannya; mulai dari hak untuk mendapat perlakuan yang sama, mendapatkan perwakilan hingga hak untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan,¹³ dan bahkan yang lebih radikal adalah hak untuk mendirikan negara berdasarkan kesadaran etnis yang merasa teropresi maupun termarginalisasi.

Gerakan Sosial Baru

Teori gerakan sosial baru kini hadir sebagai suatu pendekatan teoritis terbaru yang dapat menjelaskan perubahan karakter dari gerakan sosial seperti fenomena politik identitas. Teori ini menekankan cirri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat pasca industri di Amerika Utara dan Eropa Barat.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹² *Ibid.*, hlm. 68.

¹³ *Ibid.*, hlm. 81.

Teori ini merupakan suatu pendekatan sebagai respon terhadap kelemahan perspektif marxisme klasik mengenai wacana kelas dan determinisme ekonomi yang bersifat reduksionis.¹⁴

Karakteristik khusus dari gerakan sosial baru ini dapat dilihat dari empat aspek: a) Ideologi dan tujuan (*ideology and goals*). Paradigma ini mencatat gerakan sosial pasca industri merepresentasikan keterputusan dari gerakan era industri, dengan menitikberatkan pada otonomi dan identitas. Sifat unik lainnya, ada sifat ideologinya yang merupakan refleksi diri. b) Taktik (*tactics*), taktik ini merupakan cerminan orientasi ideologi. Biasanya gerakan sosial baru lebih cenderung untuk berada di luar saluran politik formal, menggunakan taktik mengganggu dan menggunakan opini publik untuk mendapat pengaruh politik. selain itu juga cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan direncanakan dengan representasi simbol dan kostum. c) Struktur (*structure*), sikap anti institusi dari gerakan sosial baru juga meluas kepada cara mengaturnya yang cenderung lebih longgar dengan organisasi yang tidak permanen. d) Partisipan (*participants*), basis dukungan biasanya dari kelas menengah baru, elemen-elemen dari kelas menengah lama, dan populasi feri-feri.¹⁵

Laclau dan Mouffe yang beraliran *post-marxism* (pasca marxisme) melihat gerakan sosial dalam konteks hubungan antagonistik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, keduanya dipandang telah merumuskan suatu konsep gerakan sosial baru, meski sebenarnya Mouffe lebih suka menyebutnya sebagai perjuangan demokratik baru. Konsep ini haruslah dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan baru yang muncul dalam masyarakat kapitalisme.

Perspektif ini melihat adanya agen-agen baru dalam konsepsi gerakan sosial yang memiliki posisi sama dengan buruh sebagai agen gerakan sosial. Laclau dan Mouffe juga melihat bahwa hegemoni akan muncul dalam situasi antagonisme yang memungkinkan terbentuknya *political frontiers*, yaitu suatu batas akhir dari pembentuk blok hegemonik. Antagonisme ini kemudian berperan

¹⁴ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm. 117.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 119-123.

dalam pembentukan identitas dan hegemoni dimana setiap aktor gerakan akan memahami identitas mereka melalui hubungan yang antagonistik.

Saat ini kehidupan sosial tak bisa lepas dari hegemoni kapitalisme dalam berbagai bentuk hubungannya. Budaya, kesenggangan, kelahiran, kematian, seks, dan lainnya, saat ini menjadi bidang untuk memperoleh keuntungan bagi modal. Antagonisme-antagonisme baru ini kemudian menjadi sarana bagi munculnya gerakan-gerakan sosial yang tidak hanya berbasis kelas pekerja atau buruh, melainkan terdapat agen-agen baru yang turut mewarnai gerakan sosial.

Alternatif perjuangan revolusioner yang ditawarkan oleh Laclau dan Mouffe adalah dengan mengkonstruksi suatu sistem rantai-rantai ekuivalen yang baru (*chain of equivalence*), bukan dengan revolusi kekerasan. Maksudnya adalah dengan memperdalam dan memperluas ideologi liberal ke arah demokrasi yang radikal dan plural.¹⁶ Laclau dan Mouffe tidak menghendaki adanya perjuangan melalui kekerasan atau perjuangan senjata sebagaimana yang terjadi di negara-negara sosialis Amerika Latin dan Eropa Timur, melainkan dengan perjuangan demokratis melalui pelipatgandaan ruang-ruang politik dan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan di satu titik sebagai prasyarat-prasyarat dari setiap transformasi masyarakat yang sungguh-sungguh demokratis.¹⁷

PEMBAHASAN

Integrasi, Opresi, dan Organisasi Papua Merdeka

Dalam perspektif negara, permasalahan Papua merupakan masalah integrasi yang diwarnai penentangan dan penghadangan oleh gerakan-gerakan yang bersifat separatis.¹⁸ Namun persoalan ini harus dilihat secara proporsional dan komprehensif berdasarkan sudut pandang keilmuan. Kompleksitas perdebatan status politik integrasi Papua ke dalam Negara Indonesia hingga kini menjadi perdebatan tanpa henti. Rakyat Papua atau setidaknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) beranggapan proses integrasi dan Pepera 1969 menjadi salah satu contoh

¹⁶ Laclau dan Mouffe, *Op. Cit.*, hlm. 261.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 263.

¹⁸ Nazarudin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, hal. 90.

bagaimana manipulasi sejarah yang dilakukan negara Indonesia untuk menganeksasi Papua, meng-homogenisasi dan memaksakan nasionalisme Indonesia serta mengubur sejarah lokal Papua yang penuh dengan dinamika dan heterogenitas. Indonesia dalam pandangan rakyat Papua memaksakan nasionalisme yang menyatakan bahwa Papua merupakan bagian dari wilayah NKRI dengan berbagai macam upaya dari manipulasi hingga intimidasi. Kondisi ini menjadi pemicu semakin menguatnya nasionalisme Papua dan menolak berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka dari itu, menurut Chauvel dalam Widjojo menilai nasionalisme Papua terbentuk oleh beberapa hal. *Pertama*, kekecewaan sejarah atas proses integrasi ke Indonesia. *Kedua*, elit Papua yang merasakan tereksklusi dalam persaingan dengan pejabat-pejabat Indonesia sejak penjajahan Belanda. *Ketiga*, pembangunan dan komposisi pejabat pemerintahan yang timpang dan semakin menunjukkan perasaan berbeda akibat teropresi dan termarginalisasi. *Keempat*, banyak pendatang ke Papua yang mendominasi kehidupan ekonomi politik yang semakin memperbesar perasaan termarginalisasi orang Papua di daerah sendiri.¹⁹

Perspektif lainnya juga mengungkapkan bahwa gerakan berbasis etnis di Papua selain memang karena kesadaran etnis Papua, juga merupakan resistensi terhadap kekuasaan otoriterianisme Orde Baru dan strategi relasi kekuasaan internasional terhadap Papua. Di bawah Orde Baru, masyarakat Papua merasa mengalami opresi dan ketidakadilan yang tidak hanya menghisap kekayaan alam ke wilayah lain, tetapi juga ada suatu proses homogenisasi nasionalisme Indonesia dengan cara-cara represif yang sering dinilai banyak kalangan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai latar belakang dan faktor diatas yang kemudian turut memperkuat politik identitas di Papua dengan mengejawantahkan dalam bentuk gerakan sosial dan teridentifikasi secara eksklusif berbasiskan etnis Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan yang didirikan tahun 1965 bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian Barat terlepas dari

¹⁹ Richard Chauvel dalam Muridan Satrio Widjojo dkk, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past Securing the Future*. Jakarta : Obor, LIPI, dan TIFA, 2009, hal. 9.

administrasi pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. Kata Irian merupakan singkatan yang dibuat oleh Sukarno untuk melancarkan kampanye anti-Belanda. Irian sering disebut merupakan kependekan dari Ikut Republik Indonesia Anti *Netherland*.

Dalam konteks ini, gerakan Organisasi Papua Merdeka yang mengusung identitas etnis Papua sebagai isu gerakannya merupakan manifestasi gerakan berbasis politik identitas. Hal ini ditandai dengan penolakan atau resistensi atas sesuatu yang kurang dikenal atau diterima secara umum karena dapat menimbulkan rasa tidak aman atau tidak nyaman bagi (sebagian atau semua) anggota masyarakat, bagi masyarakat Papua, sejarah dan nasionalisme Indonesia yang diindoktrinasi negara kepada masyarakat Papua menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Kecenderungan ini yang dapat dimaknai sebagai upaya “homogenisasi”, devaluasi, marjinalisasi yang dilakukan oleh negara sehingga menimbulkan ketakutan akan perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat Papua.

Di sisi lain, jika menggunakan perspektif Laclau dan Mouffe, jelas terlihat adanya suatu hegemoni dan antagonisme yang terjadi dalam relasi masyarakat dan negara di Papua. Sebagaimana dikemukakan oleh Laclau dan Mouffe bahwa antagonisme sosial membuat setiap makna sosial berkontestasi, yang kemudian memunculkan *political frontiers* atau batas akhir blok pembentuk hegemonik dimana setiap aktor akan memahami identitas mereka melalui hubungan antagonistik. Dalam hal ini masyarakat Papua merasakan upaya-upaya penindasan dan bentuk operasi lainnya yang dilakukan oleh rezim negara Indonesia seperti homogenisasi nasionalisme Indonesia, eksploitasi sumber daya alam Papua namun tidak dialokasikan untuk rakyat Papua, dan termarjinalisasinya rakyat Papua di daerahnya sendiri. Sehingga dalam hal ini masyarakat Papua mengidentifikasi diri sebagai yang berbeda dan tertindas dengan menciptakan identifikasi musuhnya yaitu negara Indonesia.

Radikalisme Gerakan: Papua Merdeka sebagai *Stated Goals*

Akan tetapi gerakan perlawanan yang digerakkan oleh masyarakat Papua melalui OPM pada dasarnya merupakan gerakan yang radikal meski sikap kompromi belakangan ditunjukkan oleh gerakan tersebut. Radikalisme gerakan tersebut terlihat dari beberapa peristiwa perlawanan senjata sejak Pepera 1969 dan semakin kuat tatkala terdapat *stated goals* atau deklarasi tujuan yang telah ditetapkan pada Juli 1971 sebagai sebuah proklamasi kemerdekaan Papua.

Sikap konfrontatif gerakan OPM merupakan resistensi terhadap upaya-upaya semakin kuatnya opresi dan marjinalisasi terhadap masyarakat Papua. Gerakan tersebut berbentuk demonstrasi, protes, dan penulisan sejarah dan pengalaman dan kekerasan yang mereka alami. OPM juga melakukan internasionalisasi gerakan dengan menggalang dukungan dari negara lain dan forum-forum lintas negara seperti PBB. Dalam perspektif negara, pengalaman sejarah masyarakat Papua dikaitkan dengan upaya separatisme.

Apa yang telah dilakukan oleh gerakan OPM memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan karakteristik gerakan sosial baru. Sebagai sebuah gerakan sosial, OPM mengusung tujuan yang bersifat otonom (merdeka) dan identitas etnis Papua. Tujuan tersebut tidak lain merupakan cerminan atas pengalaman empiris yang dilalui masyarakat Papua ditambah dengan adanya upaya homogenisasi dan opresi dalam proses integrasi politik ke dalam negara Indonesia. hal ini jelas mencirikan sebuah gerakan sosial baru.

Taktik gerakan sosial baru juga tampak dalam gerakan OPM. Pemerintah Indonesia tampaknya dibuat kelimpungan dengan demonstrasi, pembentukan opini publik yang menyatakan masyarakat Papua tertindas, pengibaran simbol bintang kejora, dan upaya pencarian dukungan internasional yang dilakukan OPM. Berbagai upaya tersebut merupakan upaya OPM untuk mendapatkan pengaruh politik. Namun demikian, OPM juga melakukan upaya perjuangan bersenjata untuk merongrong negara Indonesia. Berbagai teror penembakan yang terjadi di Papua yang ditujukan kepada Tentara Nasional Indonesia dapat dimaknai sebagai wujud perlawanan OPM terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, OPM dikenal sebagai organisasi yang tidak jelas struktur dan jejaring organisasinya. Sejak era Orde Baru, pemerintah negara Indonesia telah melakukan berbagai operasi baik kompromi maupun militer untuk menumpas perlawanan senjata OPM. Namun, hingga kini OPM selalu hadir dengan ditandai oleh pengibaran bendera Bintang Kejora dan teror-teror penembakan terhadap Tentara Nasional Indonesia. Pengikut OPM berasal dari lintas kelas dan suku. Hal ini menandakan bahwa OPM memiliki struktur yang longgar dan partisipan yang luas baik dari kelas menengah baru dan lama maupun kelompok feri-feri.

Selain itu, sedikit berbeda dengan solusi alternatif gerakan sosial baru yang ditawarkan Laclau dan Mouffe. Laclau dan Mouffe menawarkan strategi baru gerakan sosial dalam menghadapi relasi sub-ordinasi dalam masyarakat *post-industrial*, yakni melalui perjuangan demokratik, dengan membangun *chain of equivalence*, meliputi ruang-ruang politik, dan mencegah terkonsentrasinya kekuasaan, serta mengkonstruksi universalitas identitas dan tuntutan. Pada intinya, Laclau dan Mouffe menghendaki perjuangan demokratik tanpa melakukan revolusi apalagi dengan perlawanan senjata.

Apa yang terjadi dalam gerakan OPM merupakan bentuk gerakan sosial baru dimana berbasiskan politik identitas yakni etnis dengan metode gerakan radikal dan demokratik. Metode gerakan radikal tersebut tercermin dari bentuk-bentuk perlawanan senjata yang digerakkan OPM dan perjuangan demokratik tergambar dari upaya OPM melakukan universalitas identitas dan tuntutan dengan berbagai bentuk baik melalui diplomasi dengan pemerintah negara Indonesia maupun dengan menggalang simpati dan dukungan dari masyarakat internasional dengan melakukan demonstrasi, protes, penulisan sejarah pengalaman mereka dan meminta advokasi dan suaka politik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam melihat dinamika gerakan sosial yang terjadi di Papua, maka hal tersebut dengan meminjam teori Laclau dan Mouffe, dapat dilihat sebagai akibat relasi antara masyarakat Papua dengan negara (pemerintah) Indonesia yang bersifat antagonistik. Antagonisme tersebut terkonstruksi pada beberapa faktor

sebagaimana seperti kekecewaan sejarah atas proses integrasi ke Indonesia. *Kedua*, elit Papua yang merasakan tereksklusi dari persaingan dengan pejabat-pejabat Indonesia sejak penjajahan Belanda. *Ketiga*, pembangunan dan pemerintahan yang timpang dan semakin menunjukkan perasaan berbeda akibat teropresi dan termarginalisasi. *Keempat*, banyak pendatang ke Papua yang mendominasi kehidupan ekonomi politik yang semakin memperbesar perasaan termarginalisasi orang Papua di daerah sendiri.

Gerakan OPM lahir sebagai bentuk radikalisme gerakan politik identitas berbasis etnis yang menetapkan *stated goals*-nya adalah Papua Merdeka. Dengan deklarasi tujuan tersebut, OPM bergerak dengan melakukan perlawanan yang konfrontatif dengan negara Indonesia seperti melakukan perlawanan senjata dan bentuk-bentuk perlawanan lainnya. Maka dalam melihat fenomena radikalisme gerakan OPM, karakteristik gerakan sosial baru dan alternatif perjuangan yang dikemukakan oleh Laclau dan Mouffe melalui perjuangan demokratik tidaklah sepenuhnya relevan dengan karakter gerakan dan perjuangan OPM. Meski OPM tetap melakukan jalur diplomasi dan bentuk-bentuk perjuangan demokratik lainnya, berbagai peristiwa perlawanan senjata termasuk beberapa dekade lalu tatkala Papua ditetapkan statusnya menjadi Daerah Operasi Militer, maka dapat dikatakan perlawanan senjata tersebut merupakan bentuk perjuangan non-demokratik. Hal tersebut jelas mencirikan perjuangan radikal yang mensahkan penggunaan kekerasan dan menjadi karakter perlawanan garis keras.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus, *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: ELSAM, 2000.
- Howarth, David, *Discourse*. Buckingham: Open University Press, 2000. Laclau, Ernesto dan Mouffe, Chantal, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Post Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Lauer, Robert, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Terj. Alimandan, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

- Macionis, John J., *Sociology 15th Edition*, Canada: Pearson Education, 2013.
- Marsh, David and Stoker, Gerry, (Ed.), *Theory and Method in Political Science*, London: Macmillan, 1995.
- Nash, Kate, (Ed), *Readings in Contemporary Political Sociology*. Oxford: Blackwell, 2000.
- Robert, Ron E. dan Kloss, Robert Marsh, *Social Movements: Between the Balcony and Barricade*, St.Louis, Missouri: The CV. Mosby Company, 1979.
- Sjamsuddin, Nazarudin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Sukmana, Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Suseno, Nuri, *Kewarganegaraan: Tafsir, Tradisi, dan Isu-Isu Kontemporer*, Depok : Dept. Ilmu Politik FISIP UI, 2010.
- Suseno, Frans Magnis, *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikir Marxis Dari Lenin Sampai Tan Malaka*. Jakarta: PT Gramedia, 2003.
- Widjojo, Muridan Satrio, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past Securing the Future*, Jakarta: Obor, LIPI, dan TIFA, 2009.